

STRATEGI PENGEMBANGAN INVESTASI DI SEKITAR PELABUHAN PERIKANAN TIPE B DI JAWA BARAT

Agus Ruswandi dan Dewi Gartika

Peneliti pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 287, Bandung, Jawa Barat

Email : cepakfish@gmail.com

ABSTRAK

Jawa Barat memiliki dua Pelabuhan Perikanan Tipe B yaitu Pelabuhan Perikanan Kejawan (Cirebon) dan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Ratu (Sukabumi). Saat ini kondisi investasi di sekitar pelabuhan belum mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga diperlukan upaya-upaya pengembangan investasi di pelabuhan tersebut. Penelitian bertujuan: 1) mengidentifikasi keragaan infrastruktur, ekonomi, kebijakan investasi dan potensi sumberdaya investasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B di Jawa Barat; 2) merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan investasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B. Kajian dilaksanakan Bulan Maret-November Tahun 2011, di Pelabuhan Ratu (Kabupaten Sukabumi) dan Pelabuhan Perikanan Kejawan (Kota Cirebon). Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, dan data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), *Fokus Group Discussion (FGD)*, serta survey wawancara dengan pengelola pelabuhan. Data dianalisis secara deskriptif, dan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi di sekitar pelabuhan lebih berkembang di Pelabuhan Ratu dibanding dengan PPN Kejawan. Kondisi ini tidak terlepas dari perbedaan jarak ke permukiman penduduk dan sejarah pembentukan pelabuhan. Pelabuhan Ratu lebih dekat ke permukiman dan merupakan pengembangan dari pelabuhan yang sudah ada sejak dulu sehingga para nelayan secara budaya sudah terbiasa berlabuh di pelabuhan tersebut, sedangkan pelabuhan Kejawan relatif baru dan relatif jauh dari permukiman, sementara nelayan cenderung lebih suka berlabuh pada pelabuhan yang lebih dekat dengan permukiman mereka. Ada beberapa strategi yang dapat dirumuskan untuk pengembangan investasi di sekitar Kejawan dan Pelabuhan Ratu antara lain : (1) Pengembangan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan bidang usaha unggulan; (2) Pengembangan iklim usaha yang kondusif; (3) Investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di zona industri, pariwisata dan pertanian; (4) Optimalisasi fungsi BPPM dalam proses pengembangan penanaman modal (perencanaan-evaluasi); (5) Pengembangan promosi dan teknologi informasi; (6) Pelatihan petugas dan tenaga kerja secara berkala.

Kata Kunci : Investasi, Sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B, dan Pengembangan.

ABSTRACT

West Java has two Type B Fishery Port, Port Fisheries Kejawan (Cirebon) and Pelabuhan Ratu (Sukabumi District). Current investment conditions around the port has not been able to optimize all the potential that exists so that the necessary investment development efforts around the port. The Research was conducted, aims: 1) identified of infrastructure performance, economy, investment policy and investment resource potential around the Port Fishery Type B in West Java; 2) formulated investment strategy and policy development for economic development around the Port Fishery Type B. In studies conducted from March November in 2011, in Pelabuhan Ratu and Kejawan (Cirebon). Secondary data was collected from relevant agencies, and primary data collected using the

methods of PRA (Participatory Rural Appraisal), Focus Group Discussion (FGD), interviews and surveys with the port managers, and several entrepreneurs around the port. Data were analyzed descriptions and SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). The study results showed that investment in around Pelabuhan Ratu Port Fisheries more developed than Kejawanan. This condition influenced by differences in distance to the establishment of settlements and the history of the port. Pelabuhan Ratu port fisheries closer to the settlements and the development of the port which has existed since the first, so that the fishermen are culturally accustomed to dock at the port, while pelabuhan Kejawanan is a new development that is located far from the settlements, while fishermen tend to prefer anchored in the harbor others are closer to their settlements. There are several strategies that can be formulated for the development of investment in the Ports around Kejawanan and Pelabuhan Ratu port fisheries, that are: (1) development of capital investment integrated to potential business, (2) Development of a conducive business climate, (3) Public investment for improvement of infrastructure in industrial zones, tourism and agriculture, (4) optimize of function of BPPM in the process of development of capital investment (planning-evaluation), (5) Development and promotion of information technology, (6) Training of personnel and labor periodically.

Keywords : Investment, Around Fisheries Port B Type, Development

I. PENDAHULUAN

Jawa Barat memiliki dua Pelabuhan Perikanan Tipe B yaitu Pelabuhan Perikanan Kejawanan (Cirebon) dan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Ratu (Sukabumi). Saat ini kondisi investasi di sekitar pelabuhan tersebut belum dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga diperlukan upaya-upaya pengembangan agar investasi lebih berkembang. Keberadaan pelabuhan perikanan merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan perikanan untuk memperbaiki distribusi hasil perikanan.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya termasuk dalam pengembangan investasi di daerah (Setneg RI, 2004), termasuk investasi di sekitar pelabuhan perikanan tipe B.

Investasi di sekitar pelabuhan merupakan salah satu penentu bagi pengembangan perekonomian di sekitar pelabuhan. Untuk mendorong investasi tentunya diperlukan strategi dan kebijakan yang menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan antara lain: 1) Mengidentifikasi keragaan infrastruktur, ekonomi, kebijakan investasi dan potensi sumberdaya investasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B di Provinsi Jawa Barat; 2) Merumuskan opsi strategi dan kebijakan dalam meningkatkan investasi untuk pengembangan ekonomi di sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B di Provinsi Jawa Barat.

II. DATA DAN PENDEKATAN

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan Bulan Maret-November Tahun 2011, di dua pelabuhan

perikanan tipe B di Jawa Barat, yaitu Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Ratu (Kabupaten Sukabumi) dan Pelabuhan Perikanan Kejawan (Kota Cirebon).

2.2. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, dan data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), metoda *Fokus Group Discussion (FGD)*, serta survei wawancara terhadap pengelola pelabuhan. Data dianalisis secara deskriptif, sedangkan perumusan alternative kebijakan dilakukan dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) (Tim Friesner, 2011).

III. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Keragaan dan Potensi Sumberdaya Investasi di Sekitar Pelabuhan

Pelabuhan Perikanan Tipe B/Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Kejawan (Cirebon) dan Pelabuhan Ratu (Sukabumi) merupakan pusat kegiatan perikanan mulai usaha praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pelabuhan Kejawan dan Pelabuhan Ratu mempunyai luas lahan untuk industri masing-masing 74,2 ha dan 138,7 ha (Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011). Di Kejawan lahan yang dimanfaatkan baru seluas 9,04 ha (12,0%), sedangkan di Pelabuhan Ratu seluas 13,5 ha (9,7%). Masih relatif luasnya lahan yang belum dimanfaatkan merupakan potensi tersendiri bagi pengembangan investasi di sekitar kedua pelabuhan tersebut.

Saat ini ada beberapa bidang usaha (eksisting) yang telah berinvestasi di sekitar pelabuhan tersebut seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan Investasi di Pelabuhan Kejawan, dan Pelabuhan Ratu tahun 2011.

| No. | Nama Investor | Jenis Usaha | Luas Tanah (m ²) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PPN Kejawan, Cirebon | | | |
| 1. | PD Sambu | Pengolahan ikan | 4.072 |
| 2. | PT Evadarta Ciremai | Distribusi BBM (SPBU Dwi fungsi) | 3.552 |
| 3. | CV Eka Jaya Sentosa | Cold Storage | 2.038 |
| 4. | PD Horizon Group | Pengolahan ikan | 1.892 |
| 5. | PT Pan Putra Samudra | Pengalengan rajungan | 2.900 |
| 6. | UD Barokah | Pengasinan ikan | 1.675 |
| 7. | Teng Hock | Bengkel & Toko BAP | 1.400 |
| 8. | Susi Tien | Rumah Makan | 1.000 |
| 9. | UD Cirendo | Pengolahan ikan | 1.200 |
| 10. | PT Biotech Surindo | Citosan | 4.000 |
| 11. | Mohan B Bahirwani I | Rajungan | 1.353 |
| 12. | Mohan B Bahirwani II | Penjemuran hasil laut | 2.940 |

| No. | Nama Investor | Jenis Usaha | Luas Tanah (m ²) |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 13. | PT Tegalindo | Dock & Galangan kapal | 10.000 |
| 14. | PT Hacienda Ocean | Dock kapal | 22.500 |
| 15. | Industri | Gudang sarana produksi | 1.092 |
| 16. | Budiyanto R. Pandopotan | Gudang sarana produksi | 1.138 |
| | | Jumlah | 63.752 |
| PPN Pelabuhan Ratu, Sukabumi | | | |
| 1. | PT Citra Karya Utama | Docking kapal & bengkel | 3.300 |
| 2. | Kopkar Mina Nusantara | Penggunaan bangunan | 200 |
| 3. | Kopkar Mina Nusantara | Industri perikanan | 2.000 |
| 4. | Kopkar Mina Nusantara | Industri perikanan | 300 |
| 5. | PT Mekar Tunas Raya Sejati | Distribusi BBM (SPBN) | 500 |
| 6. | PT AGB Tuna | Ekspor ikan layur beku | 900 |
| 7. | PT Sari Segara Utama | Cold storage | 468 |
| 8. | CV Permata Mina Pratama | Penanganan ikan | 250 |
| 9. | Yayasan Anak Nelayan Indon. | Fillet ikan segar | 120 |
| 10. | Burhan | Alat tangkap perikanan | 600 |
| 11. | Kopkar Mina Nusantara | Bangunan shelter nelayan | 75 |
| 12. | Kopkar Mina Nusantara | Toko logistik | 120 |
| 13. | PT Danamon | Bank Simpan Pinjam | 100 |
| 14. | Kopkar Mina Nusantara | Ruang Kerja TPI | 42 |
| 15. | PT Ratu Prima Bahari Nusan. | Cold storage dan pabrik es | 4.400 |
| 16. | KUD Mina Mandiri "Sinar Laut" | Distribusi BBM (SPDN) | 96 |
| 17. | Puskesmas Nelayan | Kesehatan | 39 |
| 18. | Pegadaian | Simpan pinjam | 42 |
| | | Jumlah | 13.552 |

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011.

Beberapa permasalahan utama yang menghambat perkembangan investasi di sekitar di PPN Pelabuhan Ratu (kabupaten Sukabumi), PPN Kejawanan (Kota Cirebon) antara lain:

1) Penetapan lokasi/kawasan

Walaupun suatu kawasan investasi industri telah ditetapkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah tetapi seringkali masih memerlukan izin dari berbagai instansi yang pengurusannya cukup memakan

waktu lama dan tambahan biaya, sehingga mengurangi daya tarik investor.

2) Penentuan komoditas unggulan/sumberdaya lokal

Penentuan komoditas unggulan yang ditawarkan kepada investor seringkali mengalami perubahan prioritas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor dalam mengusahakan komoditas unggulan tersebut.

3) Permasalahan keamanan di lokasi Pelabuhan Perikanan.

Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi menyebabkan lingkungan menjadi tidak kondusif bagi investor.

- 4) Permasalahan sosial yang terjadi antara nelayan dan pengelola pelabuhan.

Konflik sosial bisa terjadi antara nelayan dengan pengelola pelabuhan atau antara nelayan dengan nelayan sendiri.

- 5) Sering terjadinya dampak lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas nelayan dan masyarakat di sekitar PPN.

Sampah dan sanitasi menjadi masalah yang sering timbul di sekitar pelabuhan.

- 6) Keadaan Sosial Ekonomi yang belum kondusif, berpengaruh terhadap aktivitas pelabuhan perikanan.

Kemampuan modal usaha masyarakat di sekitar pelabuhan dapat dikatakan masih terbatas, sehingga menjadi salah satu faktor pembatas dalam pengembangan usahanya.

- 7) Kepastian hukum yang dirasakan masih kurang oleh para investor sebagai pegangan dalam memberikan kenyamanan berusaha dalam bidang perikanan.

Status lahan untuk rencana pengembangan pelabuhan yang belum pasti, menimbulkan ketidak pastian bagi calon investor untuk mengembangkan investasinya. Secara umum di sekitar ke dua pelabuhan perikanan Tipe B tersebut terdapat beberapa bidang usaha utama antara lain:

1. Penangkapan ikan laut

2. Budidaya ikan tambak

3. Pengolahan Ikan:

- a. Pengalengan
- b. Pembekuan
- c. Pengasinan
- d. Pengasapan
- e. Abon dan lain-lain

4. Perbekalan Melaut

- a. Pabrik es
- b. Garam
- c. Oli dan suku cadang

5. Bahan alat Perikanan

6. Perbengkelan dan dock

7. Pemasaran Ikan

8. Kuliner/Rumah Makan

9. Wisata Bahari

10. Hotel/Penginapan

11. Cindramata

12. Pemancingan Ikan

3.2. Kebijakan Investasi di Bidang Perikanan dan Kelautan

3.2.1. Tingkat Nasional.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang memberikan peluang yang lebih besar dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk kemitraan dengan pihak ketiga dalam meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diwilayahnya sesuai dengan kewenangannya. Walaupun demikian, ternyata implementasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk usaha perikanan dan kelautan tersebut umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan

oleh berbagai faktor antara lain iklim investasi yang kurang menunjang seperti kondisi sumberdaya, sarana prasarana, pelayanan perijinan yang sulit, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Departemen Perikanan dan Kelautan, 2006). Salah satu kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Kelautan RI tahun 2010 salah satunya adalah peningkatan intensitas pengawasan di pelabuhan perikanan (Budi Halomoan, 2009). Dalam peraturan tersebut pembangunan perikanan tangkap didorong untuk meningkatkan investasi yang signifikan melalui upaya dari pihak Pemerintah, swasta dan masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan perikanan tangkap dilakukan melalui upaya peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan konsumsi, penerimaan devisa dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri.

3.2.2. Tingkat Provinsi Jawa Barat

Misi ke 2 RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yaitu “ Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi local”. Salah satu kebijakan pencapaian misi tersebut adalah Kebijakan Bidang Penanaman Modal, yang meliputi (Pemprov Jabar, 2010):

- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru.
- 2) Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mendorong pembangunan perikanan dan kelautan, diantaranya melalui Program Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Muara Pantai Selatan (Gapura), dengan maksud : (1) Merumuskan model pengembangan budidaya ikan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi setempat secara holistik dan berkelanjutan, dalam satu kawasan yang terintegrasi, dengan melibatkan peran multi sektor dan multi *stakeholders*; (2) Membangun berbagai kegiatan usaha perikanan dengan konsep siklus tertutup, yaitu berupa pengembangan usaha perikanan yang terkait satu sama lain, saling menguatkan, serta menghasilkan nilai tambah yang optimal, memiliki daya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Meningkatkan produktivitas, produksi, dan ragam/ macam usaha perikanan pantai dan muara, serta pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Urgensi dari Program Gapura, selain meningkatkan investasi di bidang perikanan dan kelautan juga meningkatkan kelestarian

daya dukung lingkungan pesisir dan kelautan untuk menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan. Tujuan dari Program Gapura adalah:

- 1) Mengembangkan usaha perikanan dan pengolahan hasil di kawasan pantai dan muara.
- 2) Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok/ gabungan kelompok.
- 3) Membangun berbagai kegiatan usaha perikanan dengan konsep siklus tertutup.
- 4) Memperkuat modal pelaku usaha perikanan melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis potensi pantai dan muara, serta kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.
- 5) Merehabilitasi ekosistem pantai melalui penataan kawasan mangrove, tata letak lahan pertambakan serta jaringan infrastruktur tambak (irigasi & jalan produksi-distribusi) melalui pendekatan konsolidasi lahan berbasis partisipatif.

3.2.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten Sukabumi

Upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan realisasi investasi ditempuh melalui Kebijakan Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif Bagi Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang diarahkan pada perbaikan dan perubahan pengelolaan sistem perijinan yang telah dilaksanakan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan ini adalah:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat khususnya kalangan dunia usaha dan perbankan terhadap pelayanan perijinan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi yang ditanamkan di Kabupaten Sukabumi;
3. Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang ditanamkan di Kabupaten Sukabumi;
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha;
5. Meningkatnya rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di atas 6 persen pertahun;
6. Terwujudnya pemanfaatan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan peruntukannya;
7. Terwujudnya PERDA Investasi.

Kabupaten Sukabumi belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Sukabumi, namun keinginan Pemerintah Kab. Sukabumi untuk mengembangkan penanaman modal sudah terlihat yaitu dengan telah diterbitkannya Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Perda Kab. Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Kabupaten Cirebon

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon tahun 2005-2025 adalah *"Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Religius dan Sejahtera"*. Misi yang berkaitan dengan pengembangan investasi adalah Misi-4, yaitu *"Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif, Stabil, Merata dan Berkelanjutan"*. Upaya perwujudan misi tersebut dengan cara :

1. Mengoptimalkan potensi pengolahan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
2. Terwujudnya perekonomian Kota Cirebon yang kokoh dan tangguh untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) minimum 85,
4. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 2%;
5. Pendapatan Perkapita hingga tahun 2025 mengalami peningkatan 10% s/d 20%;
6. Semakin meningkatnya jumlah investasi baik PMDN maupun PMA yang masuk ke Kota Cirebon;
7. Terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh dengan sektor perdagangan, kelautan, dan perikanan menjadi basis utama aktivitas ekonomi yang dikelola secara profesional dan menghasilkan komoditas dan berkualitas didukung oleh

industri pengolahan yang modern serta sektor jasa dengan kualitas pelayanan yang bermutu;

8. Terbangunnya pusat industri dan perdagangan serta pariwisata yang berskala nasional bahkan internasional.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013, yaitu *"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Cirebon, melalui Peningkatan Daya Beli, Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan Peningkatan Layanan Kesehatan dengan Melanjutkan Pembangunan Periode Sebelumnya"*.

Ada beberapa Misi dalam RPJMD yang terkait dengan penanaman modal yaitu:

Misi ke-5: *"Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Ekonomi, Serta Produktivitas Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi"*.

Misi ke-7: *"Meningkatkan Kemitraan dan Optimalisasi Kerjasama Pemerintah dengan Lembaga Lainnya"*.

Indikator dan target pencapaian misi ke-5 adalah menciptakan laju pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :

- Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 6%,
- Meningkatnya nilai pemasaran hasil-hasil industri baik industri kecil maupun industri rumah tangga,

- Terciptanya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 3%.

Indikator dan target pencapaian Misi ke7 adalah meningkatnya jumlah investasi antara pemerintah dan swasta serta lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dengan sasaran :

- Meningkatnya kerjasama investasi antar daerah dengan indikator berupa meningkatnya nilai investasi sebanyak

12%, dan adanya pedoman pelaksanaan kerjasama antar daerah.

3.3. Strategi dan kebijakan Pengembangan Investasi di Sekitar pelabuhan Perikanan

Penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan Investasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Tipe B ditelusuri dari analisis AWOT,yang meliputi analisis faktor internal dan eksternal sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

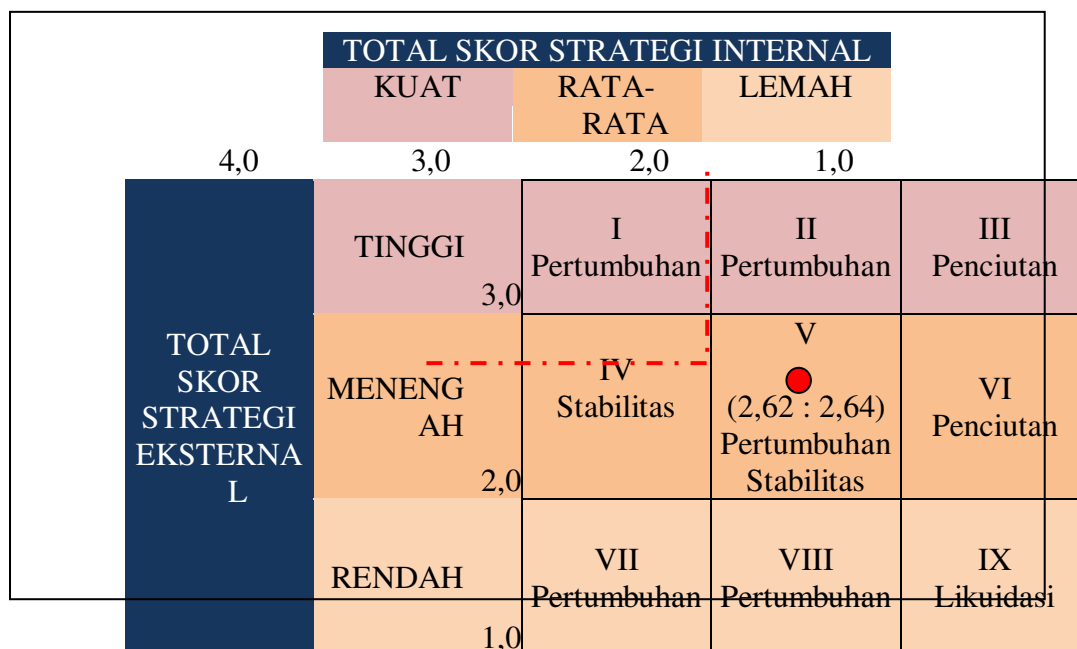
Tabel 2. Analisis faktor internal dan eksternal penanaman modal di PPN Pelabuhan Ratu dan Kejawanen, 2011

| URAIAN | BOBOT | RATING | SKOR |
|--|----------|--------|-------------|
| FAKTOR INTERNAL | | | |
| <i>Kekuatan (Strength)</i> | | | |
| 1. Komitmen dan regulasi Pemerintah/Pemda dalam meningkatkan penanaman modal di PPN cukup kuat | 0,15 | 4 | 0,6 |
| 2. Terdapat komoditas unggulan yang prospektif | 0,09 | 4 | 0,36 |
| 3. Terbukanya akses wilayah | 0,08 | 4 | 0,32 |
| 4. Wilayah terdekat merupakan wilayah investasi | 0,05 | 3 | 0,15 |
| 5. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai | 0,07 | 3 | 0,21 |
| 6. Tersedianya lokasi/lahan untuk investasi | 0,06 | 3 | 0,18 |
| Jumlah | 0,50 | | 1,82 |
| <i>Kelemahan (Weakness)</i> | | | |
| 1. Sinkronisasi dan koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemda dan antar Dinas terkait lemah | 0,07 | 2 | 0,14 |
| 2. Lembaga dan Tim PPSPT pelayanan perizinan satu pintu belum berjalan optimal | 0,08 | 2 | 0,16 |
| 3. Infrastruktur pendukung investasi belum memadai | 0,12 | 1 | 0,12 |
| 4. Promosi masih sangat terbatas | 0,15 | 2 | 0,3 |
| 5. Sistem informasi belum berjalan | 0,03 | 1 | 0,03 |
| 6. Perencanaan antar sektor untuk investasi belum memadai | 0,05 | 1 | 0,05 |
| Jumlah | 0,50 | | 0,80 |
| Total Faktor Internal | 1 | | 2,62 |
| FAKTOR EKSTERNAL | | | |
| <i>Peluang (Opportunity)</i> | | | |
| 1. Minat investor dalam negeri dan luar negeri cukup tinggi | 0,13 | 4 | 0,52 |
| 2. Dukungan pemerintah (regulasi dan komitmen) cukup kuat dalam mendorong investasi | 0,08 | 4 | 0,32 |
| 3. Iklim politik dan keamanan makro cukup kondusif | 0,05 | 4 | 0,2 |
| 4. Stabilitas ekonomi dan perbankan cukup kondusif | 0,07 | 4 | 0,28 |

| | | | |
|---|----------|---|-------------|
| 5. Potensi kemitraan dengan UKM cukup terbuka | 0,08 | 3 | 0,24 |
| 6. Permintaan ekspor produk dalam negeri cukup tinggi | 0,09 | 3 | 0,27 |
| Jumlah | 0,5 | | 1,83 |
| Ancaman (Threat) | | | |
| 1. Daya tarik investasi di wilayah Kab/Kota lain | 0,12 | 2 | 0,24 |
| 2. Kurangnya pengawalan Pemda terhadap penanam modal | 0,07 | 1 | 0,07 |
| 3. Insentif yang kurang kompetitif | 0,09 | 2 | 0,18 |
| 4. Tingkat kerawanan sosial tinggi | 0,07 | 1 | 0,07 |
| 5. Iklim politik/kebijakan yang kurang pasti | 0,05 | 1 | 0,05 |
| 6. Pelayanan yang tidak prima | 0,1 | 2 | 0,2 |
| Jumlah | 0,5 | | 0,81 |
| Total Faktor Eksternal | 1 | | 2,64 |

Dari hasil analisis faktor eksternal dan internal diketahui bahwa kondisi penanaman modal di PPN Kejawan (Cirebon) dan Pelabuhan Ratu (Sukabumi) terletak pada kuadran lima (V), yaitu pada posisi “Pertumbuhan dan Stabilitas”, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor

internal memiliki derajat kekuatan dan kelemahan pada level rata-rata, sedangkan faktor eksternal memiliki derajat potensi dan ancaman pada level menengah. Pada kondisi ini diperlukan strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal yang relatif lebih agresif untuk melakukan pengelolaan (konsolidasi).



Gambar 1. Kuadran Strategi Penanaman Modal di sekitar Pelabuhan Perikanan di Kejawan dan Pelabuhan Ratu

Keterangan:

I = Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal.

Strategi utama yang memiliki posisi terbaik atau terkuat untuk meningkatkan performa sesuai yang diharapkan.

II = Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal.

Strategi untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang dicapai dengan memanfaatkan Kekuatan yang ada.

III = Strategi *turn around*

Strategi yang menekankan peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

IV = Strategi stabilitas

Strategi mempertahankan kegiatan secara hati-hati.

V = Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal

Strategi yang relatif lebih agresif dengan melakukan konsolidasi dalam penerapannya.

VI = Strategi stabilitas

Strategi mempertahankan kegiatan karena tidak ada perubahan terhadap hasil atau target pencapaian yang telah ditetapkan keuntungan.

VII = Strategi divestasi

Strategi memanfaatkan kekuatannya untuk membuat kebijaksanaan baru secara efisien karena berdasarkan kebijaksanaan sebelumnya sudah dilaksanakan secara baik dengan hasil yang sesuai dengan diharapkan.

VIII = Strategi diversifikasi konsentrik

Strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk menciptakan lebih banyak hasil yang diharapkan.

XI = Strategi diversifikasi konglomerat

Strategi perubahan struktur/institusi untuk pencapaian hasil yang lebih baik.

X = Strategi likuidasi atau bangkrut

Strategi mengakhiri atau menghentikan kebijaksanaan yang sedang dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kondisi yang lebih buruk.

Hasil analisis internal dan eksternal dipilih beberapa komponen dominan yang selanjutnya dipakai untuk melakukan analisis matrik strategi dan penentuan kebijakan pengembangan yang hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dalam Penanaman Modal di PPN Kejawan, Cirebon dan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. 2011.

| SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Makin membaiknya kinerja penanaman modal. • Makin meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait di semua level pemerintahan dalam penanaman modal. • Terwujudnya pelayanan prima dalam penanaman modal. | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan bidang usaha unggulan. • Pengembangan iklim usaha yang kondusif. • Investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di zona industri, pariwisata dan | <ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan stabilitas politik (mayoritas-minoritas), stabilitas sosial (kesenjangan sosial, "sara") dan stabilitas ekonomi (harga-harga, tariff, dan lain-lain). • Penyelenggaraan penanaman modal secara patisipatif di semua tingkatan pemerintahan. |

| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya zonasi industri dan pariwisata dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai. • Meningkatnya pengelolaan penanaman modal secara terpadu dan berkelanjutan. • Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari penanaman modal. | <p>pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi fungsi BPPM dalam proses pengembangan penanaman modal (perencanaan-evaluasi). • Pengembangan promosi dan teknologi informasi. • Pelatihan petugas dan tenaga kerja secara berkala | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kasitas perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal di semua tingkatan. • Pengembangan sistem dan mekanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel. • Peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen penanaman modal. |
|---|--|--|

IV. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

1) Ada perbedaan antara PPN Kejawanan dan PPN Pelabuhan Ratu, dari sisi kondisi jalan dan akses ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah. PPN Kejawanan terletak dipinggir Kota Cirebon yang dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah Jabar Utara, serta berada pada Jalur jalan Pantura yang cukup baik aksesnya, dengan infrastruktur jalan relatif lebih baik. Sedangkan PPN Pelabuhan ratu berada di Jawa Barat Selatan yang relatif jauh dari Pusat pertumbuhan utama dengan kontur cukup bergelombang serta kondisi jalan yang relatif kecil, menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pelabuhan. Kondisi laut di PPN Kejawanan lebih dangkal, sedangkan di Pelabuhan Ratu lebih dalam. Jumlah kapal yang berlabuh di PPN Pelabuhan ratu lebih banyak dibanding dengan di PPN Kejawanan, sehingga investasipun lebih berkembang di PPN Pelabuhan Ratu dibanding dengan PPN Kejawanan.

2) Berdasarkan analisis SWOT dapat dirumuskan beberapa strategi untuk pengembangan investasi di sekitar PPN Perikanan di Jawa Barat (Pelabuhan Kejawanan dan Pelabuhan Ratu antara lain : (1) Pengembangan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi dalam bentuk pendekatan bidang usaha unggulan; (2) Pengembangan iklim usaha yang kondusif; (3) Investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur di zona industri, pariwisata dan pertanian; (4) Optimalisasi fungsi BPPM dalam proses pengembangan penanaman modal (perencanaan-evaluasi); (5) Pengembangan promosi dan teknologi informasi; (6) Pelatihan petugas dan tenaga kerja secara berkala.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa alternative saran kebijakan sebagai berikut:

- 1). Bidang usaha unggulan yang perlu ditetapkan secara konsisten.
- 2). Perlu adanya peningkatan promosi yang dapat dilakukan melalui media

promosi seperti web site, blog khusus milist email dan lain-lain, serta Melalui promosi langsung seperti kegiatan Pameran, kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional), dan cara lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011.
Profil PPN Kejawanan Cirebon 2011

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Halomoan. 2009. Refleksi 2009 & Outlook 2010. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Departemen Perikanan dan Kelautan, 2006. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Setneg RI. 2004. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Setneg RI. 2004. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Profil PPN Kejawanan Cirebon 2011. Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Tim Friesner. http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT, diakses 21 juli 2011.
- Pemprov Jabar, 2010. Peraturan Daerah No 25. Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013